

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Muhammadiyah sejak kelahirannya dikenal sebagai Gerakan Islam yang berkiprah di ranah dakwah Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak berjuang di lapangan politik serta tidak memiliki hubungan apapun dengan kekuatan politik manapun di negeri tercinta ini dikemudian hari Muhammadiyah bahkan membentengi dirinya dari politik dengan Khittah (Garis Perjuangan) yang telah mandarah daging dalam tubuh persyarikatan ini. (Nashir, 2008) Dalam konsistensi gerakan dakwah dan komitmen menjaga marwah organisasi tersebut, posisi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang hadir di tengah masyarakat, termasuk pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah.

Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi keagamaan dan non politik. William Shepar mengatakan, Muhammadiyah sebagai kelompok *Islamic Modernism* yang lebih memfokuskan diri pada gerakan membangun Islamic society (masyarakat Islam) daripada memperhatikan *Islamic state* (negara Islam) yang fokus gerakannya kepada bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, serta tidak menjadi organisasi politik sekalipun para anggotanya tersebar di berbagai partai politik. Para penulis atau pun para peneliti Islam seperti James L. Peacock, Mitsuo Nakamura, Clifford Geertz, Robert van Neil, Harry J. Benda, George T. Kahin, Alfian, Deliar Noer dan tokoh lainnya, mereka mengkategorikan Muhammadiyah

sebagai gerakan Islam modernis yang gerakannya bersifat kultural dan non-politik. Karena itu, Muhammadiyah memang sejak awal berdirinya dan telah menjadi fakta sejarah bahwa Muhammadiyah tidak bergerak dalam bidang politik dan lebih berkonsentrasi pada gerakan dakwah di ranah kemasyarakatan. Namun dalam perjalanan sejarah, Muhammadiyah juga tidak lepas dari adanya pengaruh politik-praktis, yakni politik yang berorientasi kepada perjuangan kekuasaan sebagaimana yang dilakukan oleh partai-partai politik dalam negara modern. (Rohmansyah, 2018).

Dalam konteks pemilihan kepala daerah Muhammadiyah memiliki batasan-batasan yang mengatur Muhammadiyah tetap menjadi organisasi Islam yang tidak terlibat dalam politik praktis. Momentum pilkada adalah sarana rakyat untuk secara bebas dan aktif menyeleksi siapapun yang dipercaya dan diyakini mampu memimpin daerah dengan segala konsekuensi politik yang mungkin akan terjadi. Dalam implementasi kedaulatan, rakyat berperan besar di dalam mewujudkan geliat dinamika politik dan pemerintahan lokal. Sebab, penentu tertinggi memang berada di tangan rakyat. Pada konteks itu pula, partisipasi rakyat menjadi instrumen penting guna menambatkan legitimasi secara layak bagi kepala daerah yang terpilih (Akbar, 2016)

Dinamika politik, khususnya pada tingkat lokal, sering kali menghadirkan tantangan tersendiri bagi Muhammadiyah. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi arena politik yang tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari keberadaan organisasi keagamaan, termasuk Muhammadiyah. Dalam konteks ini, warga dan kader Muhammadiyah sebagai bagian dari masyarakat tetap memiliki hak politik

untuk menentukan pilihan, sehingga berpotensi memunculkan perbedaan sikap dan pandangan dalam menyikapi kontestasi politik.

Pilkada 2024 di Kota Tasikmalaya menunjukkan adanya dinamika politik yang melibatkan Muhammadiyah, khususnya pada tingkat Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM). Sebagai organisasi yang memiliki basis massa dan pengaruh sosial yang cukup besar, Muhammadiyah menjadi salah satu aktor yang diperhitungkan dalam politik lokal. Kondisi ini terlihat dari adanya interaksi antara calon kepala daerah dengan pimpinan Muhammadiyah, serta perbedaan sikap di kalangan warga dan organisasi otonom Muhammadiyah dalam menentukan pilihan politik.

Pilkada serentak menghadirkan dinamika politik yang menempatkan Muhammadiyah pada situasi dilematis antara konsistensi menjaga Khittah Muhammadiyah dan realitas kedekatan personal sebagian kader dengan kandidat tertentu. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketegangan internal sekaligus mengaburkan citra kelembagaan Muhammadiyah di ruang publik. Kondisi tersebut tidak terlepas dari latar belakang historis sikap politik Muhammadiyah, terutama pada masa transisi reformasi, ketika melalui Sidang Tanwir di bawah kepemimpinan Amien Rais sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, organisasi ini memberikan mandat untuk melakukan ijtihad politik sebagai respon atas dinamika politik nasional. Ijtihad ini juga dimaksudkan untuk mengakomodasi aspirasi sebagian warga Muhammadiyah yang menginginkan adanya partai politik sebagai sarana penyaluran aspirasi politik. Dari proses tersebut kemudian lahir Partai Amanat Nasional (PAN), yang berlandaskan nilai-nilai moral keagamaan,

kemanusiaan, dan kemajuan, serta menjadikan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan, dan keadilan sebagai prinsip perjuangannya.

Salah satu keputusan penting dari sidang tanwir di era kepemimpinan Amien Rais sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah ini adalah mengamanatkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk melakukan ijtihad politik, terutama dalam merespons situasi politik nasional di era reformasi, termasuk keinginan sebagian warga Muhammadiyah terhadap pendirian partai politik sebagai wadah yang dapat menampung aspirasi politik mereka. Maka dari itu muncul partai baru yaitu Partai Amanat Nasional yang mempunyai cita-cita PAN adalah berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajuan. Prinsip dasar PAN adalah memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan, dan keadilan. (Al-Hamdi, 2020)

Menjelang momentum pemilihan kepala daerah, relasi antara Muhammadiyah dan partai politik kerap menjadi sorotan publik, terutama terkait kedekatannya dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan adanya kader Muhammadiyah Kota Tasikmalaya yang pernah menjadi Wali Kota Tasikmalaya periode 2007-2012 dan beliau juga sebagai kader PAN yaitu H. Syarif Hidayat, relasi tersebut sering dipersepsikan sebagai hubungan yang harmonis, mengingat dalam praktiknya Muhammadiyah dan PAN ketika pemilihan kepada daerah waktu itu mendukung H. Syarif Hidayat untuk menjadi walikota pada masa itu. Dalam konteks Pilkada 2024 Kota Tasikmalaya, kondisi tersebut semakin menegaskan dinamika politik Muhammadiyah di tingkat lokal. Di satu sisi, masih terdapat persepsi publik mengenai kedekatan Muhammadiyah dengan PAN akibat faktor

historis dan keberadaan kader Muhammadiyah dalam struktur atau lingkaran politik PAN. Namun di sisi lain, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa warga dan kader Muhammadiyah tersebar dalam berbagai pilihan politik dan tidak terkonsolidasi pada satu partai atau kandidat tertentu. Situasi ini menuntut Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya untuk menjaga jarak kelembagaan secara tegas, sekaligus mengelola relasi historis dan sosial yang ada agar tidak menimbulkan anggapan adanya dukungan politik organisasi. Dinamika inilah yang menjadi bagian penting dalam memahami praktik politik Muhammadiyah di tingkat lokal, khususnya dalam menghadapi kontestasi Pilkada.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya tercatat pernah menerima kunjungan silaturahmi dari sejumlah calon kepala daerah menjelang Pilkada 2024, di antaranya Muhammad Yusuf sebagaimana diberitakan dalam NewsTasikmalaya (2024) dengan judul “Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya beri dukungan kepada Muhammad Yusuf sebagai bakal calon wali kota”, serta Viman yang melakukan silaturahmi dan buka puasa bersama keluarga besar PD Muhammadiyah Kota Tasikmalaya sebagaimana dimuat dalam Kapol.id (2024). Meskipun dalam pemberitaan tersebut ditegaskan bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya hanya bersikap normatif dengan menerima silaturahmi tanpa memberikan dukungan politik secara kelembagaan, di tengah masyarakat tetap berkembang kecurigaan dan pertanyaan publik, khususnya terkait alasan mengapa dari lima calon kepala daerah yang berkompetisi hanya dua kandidat yang tercatat diterima dalam agenda silaturahmi resmi. Kondisi ini kemudian memunculkan persepsi bahwa Muhammadiyah dinilai

cenderung condong kepada salah satu kandidat tertentu. Persepsi tersebut semakin menguat seiring dengan dinamika di lingkungan organisasi otonom (Ortom) Muhammadiyah, di mana pada tingkat individu pengurus maupun anggota terlihat adanya perbedaan pilihan politik selama Pilkada 2024, meskipun secara struktural ortom tetap menyatakan netral. Perbedaan preferensi politik ini berpotensi mempertegas perpecahan di internal persyarikatan dan memperluas tafsir publik mengenai posisi politik Muhammadiyah, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga konsistensi dinamika politik Muhammadiyah di tengah kontestasi politik lokal.

Situasi ini berpotensi memunculkan beberapa implikasi. Secara internal, perbedaan pilihan politik individu dapat menimbulkan gesekan antar anggota dan organisasi otonom Muhammadiyah, terutama jika ekspresi dukungan dilakukan secara terbuka melalui struktur organisasi, fasilitas persyarikatan, atau identitas kelembagaan. Secara eksternal, citra Muhammadiyah dapat tercoreng apabila masyarakat menilai bahwa organisasi condong ke salah satu kandidat, sehingga memunculkan asumsi politisasi agama atau *political endorsement*. Ketegangan ini menjadi tantangan penting bagi dinamika politik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya di era demokrasi elektoral, terutama dalam konteks politik lokal yang berkaitan erat dengan kehidupan sosial dan keagamaan.

Pilkada 2024 di Kota Tasikmalaya merupakan kontestasi politik daerah yang berlangsung secara ketat dan kompetitif, sehingga melahirkan berbagai dinamika politik yang tidak hanya melibatkan aktor politik formal, tetapi juga menjadikan organisasi Islam sebagai sasaran pendekatan para elite politik lokal

untuk memperoleh dukungan elektoral. Dalam konteks tersebut, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam di Kota Tasikmalaya turut menjadi objek lobi dan pendekatan politik dari para elite yang mengusung calon kepala daerah. Situasi inilah yang membentuk dan memengaruhi dinamika politik Muhammadiyah, khususnya pada level Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya dalam menghadapi Pilkada 2024

Ketua PP Muhammadiyah Prof Haedar Nasir mengatakan Menjelang pilkada serentak 2024 meminta pengurus, kader, bahkan simpatisan Muhammadiyah untuk membaca Khittah (suaramuhammadiyah, 2024). Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, memberikan pernyataan penting sebelum pelaksanaan pilkada serentak 2024. Beliau meminta para pengurus, kader, dan juga simpatisan Muhammadiyah untuk kembali membaca dan memahami Khittah Muhammadiyah. Ajakan tersebut bukan sekadar bersifat seremonial, melainkan merupakan bentuk upaya internal Muhammadiyah dalam membangun kesadaran politik warga persyarikatan agar mampu menyikapi kontestasi politik secara dewasa, rasional, dan terarah sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam konteks Pilkada 2024 di Kota Tasikmalaya, upaya ini menjadi bagian dari dinamika politik Muhammadiyah yang dihadapi oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Tasikmalaya, terutama dalam mengelola keberagaman preferensi politik kader, merespons tekanan politik lokal, serta menjaga kejelasan posisi kelembagaan Muhammadiyah di ruang publik. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa peran PDM tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam

menegosiasikan relasi antara nilai-nilai organisasi, kepentingan politik individual kader, dan realitas kompetisi politik lokal yang terus berkembang.

Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan dapat memainkan peran politik lobi, komunikasi politik, sosialisasi politik, pendidikan politik, melakukan kritik atau tekanan publik, dan distribusi kader politik atau kader profesional lainnya yang dapat masuk keseluruh lini pemerintahan. Muhammadiyah dalam bermasyarakat dan bernegara dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai kelompok kepentingan, Muhammadiyah dalam kegiatan bermasyarakat dan bernegara berlandaskan Khittah perjuangan sebagai payung hukum gerakan. Khittah berfungsi sebagai garis pembatas dan pembingkai Muhammadiyah agar tetap berada di koridornya yakni bergerak di bidang dakwah dan tajdid di lapangan kemasyarakatan, serta tidak bergerak dalam politik praktis di ranah perjuangan kekuasaan sebagaimana partai politik. Tetapi dengan Khittah itu Muhammadiyah dapat memainkan fungsi kelompok kepentingan atau kekuatan moral dan proaktif dalam dinamika politik kebangsaan, dengan tetap pelaksanaannya berpijak pada prinsip-prinsip organisasi dan etika gerakan yang berlaku dalam Muhammadiyah. (Boby & Gazalin, 2024).

Gerakan Muhammadiyah dalam bidang politik telah sesuai dengan Khittahnya yaitu dakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam arti dan proposisi yang sebenar-benarnya dimana Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis dan konseptual. Gerakan organisasi Muhammadiyah dalam bidang politik tersebut merupakan juga bagian gerakannya dalam masyarakat, dan dilaksanakan berdasarkan landasan dan peraturan yang berlaku dalam Muhammadiyah. Gerakan

Muhammadiyah dalam Politik ini ditegaskan kembali pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-38 yang menegaskan bahwa pertama, Organisasi Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, yang mana tidak mempunyai hubungan organisatoris dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai politik atau organisasi apapun. Kedua, setiap anggota organisasi Muhammadiyah sesuai hak asasi yang diberikan keleluasaan untuk memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam persyarikatan Muhammadiyah. (Wiharto, 2010 di kutip dari Harsono et al., 2015).

Secara konseptual, Muhammadiyah dapat dipahami sebagai kelompok kepentingan (*interest group*) yang memiliki kapasitas untuk memainkan berbagai peran politik non-elektoral, seperti melakukan lobi, komunikasi politik, sosialisasi dan pendidikan politik, kritik serta tekanan publik, hingga distribusi kader politik dan kader profesional ke berbagai lini pemerintahan. Seluruh peran tersebut dijalankan dalam kerangka kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan berlandaskan pada Khittah perjuangan Muhammadiyah sebagai payung normatif gerakan. Khittah berfungsi sebagai garis pembatas sekaligus pembingkai agar Muhammadiyah tetap berada pada koridor dakwah dan tajdid di ranah kemasyarakatan, serta tidak terlibat dalam politik praktis kekuasaan sebagaimana partai politik. Dengan demikian, Muhammadiyah tetap dapat berperan sebagai kekuatan moral yang proaktif dalam dinamika politik kebangsaan, selama pelaksanaannya berpijak pada prinsip organisasi dan etika gerakan yang berlaku.

Prinsip tersebut ditegaskan kembali dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-38 yang menyatakan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah Islam yang beramal dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan masyarakat tanpa memiliki hubungan organisatoris maupun afiliasi dengan partai politik mana pun, sekaligus memberikan kebebasan kepada setiap anggotanya untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik sebagai hak individu sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan persyarikatan. Namun, dalam realitas politik lokal, penerapan prinsip tersebut tidak selalu berjalan secara baik. Pilkada 2024 di Kota Tasikmalaya menghadirkan dinamika politik yang mempengaruhi sikap dan peran Muhammadiyah, khususnya pada tingkat Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM). Kedekatan personal sebagian kader dengan kandidat tertentu, intensitas komunikasi antara elit persyarikatan dan aktor politik lokal, serta adanya lobi dan ajakan dukungan menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak sepenuhnya berada di luar pusaran politik lokal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketegangan internal dan memperluas tafsir publik terhadap posisi politik Muhammadiyah, sehingga menuntut PDM Kota Tasikmalaya untuk mampu menjaga netralitas kelembagaan sekaligus mengelola peran politiknya sebagai kelompok kepentingan dan kekuatan moral di tengah kontestasi politik yang berlangsung.

Kontribusi politik Muhammadiyah, sebagaimana posisinya sebagai civil society adalah pembinaan masyarakat dan berperan aktif dalam fungsi kritik dan masukan terhadap Negara. Bagi Muhammadiyah, politik yang dikembangkannya adalah politik nilai yang tidak pernah jauh dari rakyat, sehingga ranah politik yang

dikembangkannya adalah ranah politik yang selalu berpihak pada nilai, termasuk kaum mustadh'afin. (Tanthowi, 2019). Sebagai bagian dari civil society, Muhammadiyah menjalankan kontribusi politiknya melalui pembinaan sosial kemasyarakatan serta keterlibatan aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap negara. Orientasi politik Muhammadiyah tidak diarahkan pada perebutan kekuasaan, melainkan pada penguatan politik nilai yang berpijak pada kepentingan umat dan keberpihakan kepada rakyat, terutama kelompok mustadh'afin. Prinsip politik nilai inilah yang menjadi landasan normatif dalam merespons berbagai dinamika politik, termasuk dalam konteks kontestasi politik elektoral di tingkat lokal.

Dalam realitas politik lokal, seperti pada pelaksanaan Pilkada, Muhammadiyah dihadapkan pada dinamika yang semakin kompleks akibat intensitas antara elite persyarikatan, kader, dan aktor politik setempat. Situasi ini menempatkan Muhammadiyah khususnya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya dalam posisi yang strategis sekaligus dilematis, yakni mempertahankan peran sebagai kekuatan moral masyarakat tanpa terseret ke dalam praktik politik kekuasaan

Dengan demikian, Dinamika politik Muhammadiyah dalam konteks Pilkada 2024 di Kota Tasikmalaya menjadi isu yang penting untuk dikaji. Penelitian ini tidak hanya berupaya melihat bagaimana kebijakan organisasi disusun dan dikomunikasikan kepada kader dan ortom, tetapi juga bagaimana jaringan Muhammadiyah di akar rumput merespons tekanan politik, mobilisasi dukungan, dan dinamika pilihan individu. Selain itu, penelitian ini relevan dalam upaya

menemukan strategi efektif agar Muhammadiyah tetap dapat menjaga jarak dari politik praktis tanpa mengekang hak politik personal para warganya.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ashim Mustaqim (2025) berjudul Sikap Muhammadiyah di Tengah Kontestasi Pemilihan Presiden Pasca Orde Baru menunjukkan bahwa Muhammadiyah secara konsisten menempatkan dirinya sebagai gerakan dakwah yang menjaga jarak dari kompetisi perebutan kekuasaan politik. Sikap independen dan non-partisan yang dipertahankan dalam berbagai pemilihan presiden pasca-Orde Baru memperlihatkan komitmen Muhammadiyah terhadap politik nilai, dengan penyerahan pilihan politik kepada warga sebagai hak individual. Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan konsistensi implementasi Khittah Muhammadiyah pada tingkat nasional, analisisnya cenderung normatif dan belum menguji bagaimana prinsip tersebut dioperasionalkan dalam konteks politik daerah yang memiliki dinamika lebih kompleks, seperti Pilkada.

Sejalan dengan itu, penelitian Andy Dermawan, Tulus Warsito, dan Mahli Zainuddin (2019) mengenai Perilaku Politik Elite Muhammadiyah pada Pilkada di Temanggung mengungkapkan kecenderungan moderasi sikap elite Muhammadiyah dalam menghadapi kontestasi lokal. Temuan bahwa keterlibatan politik terjadi pada level personal tanpa institusionalisasi dalam struktur organisasi memperlihatkan adanya pemisahan antara identitas organisasi dan preferensi individu. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada perilaku aktor daripada pada kerangka kebijakan organisasi, sehingga belum mampu menjelaskan

bagaimana Muhammadiyah sebagai institusi secara strategis menjaga konsistensi Khittah di tengah tekanan politik lokal.

Lebih lanjut, penelitian Ali Ridho (2019) tentang Arah Politik Muhammadiyah dalam Pilpres 2019 menegaskan posisi netral Muhammadiyah sebagai kekuatan moral yang menekankan etika politik dan menolak politisasi agama. Kajian ini memperkuat argumentasi mengenai pemisahan antara sikap organisasi dan pilihan politik individu warga Muhammadiyah. Akan tetapi, fokus penelitian yang berada dalam konteks politik nasional menyebabkan analisisnya belum menyentuh dimensi praksis organisasi pada level lokal, di mana interaksi antara elite, kader, dan lingkungan politik sering kali menghadirkan tantangan yang berbeda.

Melengkapi perspektif tersebut, penelitian A. Khoiruddin (2025) berjudul Muhammadiyah dan Dinamika Politik Kebangsaan di Indonesia menyoroti kontribusi Muhammadiyah dalam penguatan nilai demokrasi, toleransi, dan keadilan sosial melalui pendekatan moderat dan inklusif. Penelitian ini penting dalam memetakan posisi strategis Muhammadiyah dalam kehidupan politik kebangsaan. Namun demikian, pendekatan makro yang digunakan cenderung menempatkan Muhammadiyah sebagai aktor normatif dalam diskursus nasional, sehingga belum memberikan gambaran empiris mengenai dinamika internal organisasi ketika menghadapi realitas politik lokal yang lebih pragmatis dan kontekstual.

Selain itu, penelitian Ahmad Sholikin (2018) mengenai hubungan Muhammadiyah dengan partai politik menunjukkan bahwa relasi organisasi ini

dengan kekuatan politik bersifat dinamis sekaligus menjaga independensi kelembagaan. Penelitian tersebut memperkaya pemahaman tentang orientasi politik nilai yang diusung Muhammadiyah, tetapi pembahasannya masih berada pada tataran relasi struktural dalam konteks nasional. Akibatnya, kajian ini belum menjelaskan bagaimana relasi tersebut termanifestasi dalam praktik politik lokal, terutama dalam situasi kontestasi elektoral yang melibatkan interaksi langsung antara aktor politik dan basis sosial organisasi.

Berdasarkan evaluasi kritis terhadap penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai Muhammadiyah dalam ranah politik masih didominasi oleh pendekatan normatif dan perspektif nasional. Penelitian pada konteks lokal memang telah dilakukan, namun cenderung berfokus pada perilaku individu atau elite, bukan pada dinamika kelembagaan organisasi dalam merespons tekanan politik. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang signifikan dalam memahami bagaimana Muhammadiyah di tingkat daerah mengartikulasikan Khittah secara praktis dalam menghadapi kontestasi politik lokal. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji dinamika politik Muhammadiyah pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya dalam konteks Pilkada 2024, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris sekaligus analitis terhadap pengembangan kajian politik keagamaan di tingkat lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana dinamika internal Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya dalam merespons pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali kota yang berkompetisi?
2. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya dalam menentukan arah kebijakan politiknya pada Pilkada 2024?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memusatkan perhatian pada dinamika politik Muhammadiyah dalam menghadapi Pilkada 2024 di Kota Tasikmalaya, dengan ruang lingkup kajian yang dibatasi pada Muhammadiyah di tingkat Pimpinan Daerah Kota Tasikmalaya. Fokus penelitian diarahkan pada cara Muhammadiyah menyikapi dinamika politik yang berkembang dalam proses pemilihan kepala daerah, terutama ketika berhadapan dengan kondisi politik lokal yang ditandai oleh adanya tekanan, lobi, serta ajakan dukungan dari para calon kepala daerah. Penelitian ini tidak mengkaji seluruh aktivitas politik Muhammadiyah secara nasional maupun dinamika politik Indonesia secara umum, melainkan terbatas pada proses pengambilan keputusan dan sikap organisasi di tingkat lokal. Analisis penelitian pada kebijakan organisasi, arahan struktural, serta langkah-langkah strategis yang ditempuh oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya dalam menjaga martabat organisasi,

netralitas, dan konsistensi nilai-nilai Muhammadiyah di tengah dinamika politik lokal pada Pilkada 2024.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika politik Muhammadiyah di Kota Tasikmalaya dalam kontestasi politik lokal pada Pilkada 2024 di Kota Tasikmalaya

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat besar bagi perkembangan pengetahuan, khususnya dalam memahami gerakan sosial keagamaan dan politik keagamaan. Hasil penelitian mengenai dinamika politik Muhammadiyah pada pilkada 2024 di Kota Tasikmalaya penelitian ini dapat membantu memperdalam pemahaman mengenai bagaimana organisasi keagamaan beradaptasi dalam lingkungan politik nyata. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan sosial tidak hanya fokus pada dakwah dan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga memiliki sistem ideologi dan struktur yang kuat untuk menjaga nilai-nilai organisasi tetap konsisten meskipun berada dalam situasi politik yang sangat kompetitif.

1.5.2 Manfaat Praktis

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya dalam menyikapi dan

mengelola dinamika politik pada Pilkada 2024 tanpa mengabaikan identitas dan nilai-nilai organisasi. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh pimpinan Muhammadiyah di tingkat lain sebagai referensi dalam merumuskan sikap dan strategi organisasi ketika berhadapan dengan kontestasi politik lokal. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi aktor politik, pemerintah daerah, dan organisasi keagamaan lainnya dalam memahami posisi strategis Muhammadiyah sebagai kekuatan moral dalam kehidupan politik lokal.